

INFO DEMOGRAFI

Dr. Ir. LILIS HERI MIS CICIH, MSi
LD-FEB Universitas Indonesia

PROGRAM UPPKS DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN IBU-IBU

1. Pendahuluan

Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) selain terkait upaya penurunan kelahiran, juga program untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Pendampingan oleh BKKBN dilakukan terhadap kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), terutama bagi keluarga pra Sejahtera (pra KS) dan Keluarga Sejahtera (KS) I. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu mengentaskan kemiskinan pada keluarga pra sejahtera, dengan memberikan pelayanan KB dan meningkatkan ekonomi keluarga. Jika kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, maka merupakan langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan salah satu tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Namun untuk mewujudkan tujuan mulai ini tidak mudah, tentunya banyak hambatan dan kendala dalam pengembangan kelompok UPPKS tersebut. Seperti pada umumnya, kendala yang dihadapi terkait dengan permodalan, bahan baku, teknis produksi dan pemasaran hasil usaha. Selain itu juga kendala pendamping baik menyangkut pengetahuan maupun dana operasional. Padahal sudah selayaknya kegiatan UPPKS dilakukan dengan pendampingan yang berkesinambungan.

Pemerintah melalui BKKBN mengulirkan bantuan modal usaha kepada kelompok-kelompok UPPKS, namun bantuan ini juga belum dapat digunakan sepenuhnya oleh kelompok UPPKS. Kendala yang dihadapi terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh UPPKS, diantaranya yaitu masalah perijinan atau belum berbadan hukum. Salah satu persyaratan untuk memperoleh bantuan tersebut yaitu setiap kelompok UPPKS harus memiliki AD/ART dan berbadan hukum. Jika belum berbadan hukum, kadang diajarkan untuk bergabung dengan lembaga yang sudah berbadan hukum, seperti koperasi.

Pendanaan dari pemerintah untuk pelaksanaan program ini, umumnya bersumber dari berbagai pendanaan seperti APBN dan APBD. Penyalurannya dilakukan antara lain melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui bank.

Berdasarkan data yang ada, jumlah anggota UPPKS pada Tahun 2015 sebanyak 12,405 orang, diantaranya sebanyak 6,923 orang berasal dari keluarga pra KS dan KS I. Anggota UPPKS dari pra KS dan KS I tersebut, sekitar 56,17 persen berstatus PUS (Pasangan Usia Subur) yang menggunakan alat kontrasepsi atau ber KB (Keluarga Berencana).

Pelaksanaan UPPKS ditujukan untuk semua wilayah, tidak hanya di daerah perdesaan, namun juga di perkotaan terutama daerah kumuh dan miskin. Salah satu ciri kondisi kampung perkotaan kumuh yaitu sangat padat dengan permukiman warga, dan menghadapi berbagai persoalan multi-dimensi, sosial, kesehatan, dan lingkungan. Umumnya semua persoalan tersebut tidak terlepas dari permasalahan pokok yaitu ekonomi. Apalagi lingkungan tempat tinggal mereka yang sangat padat sudah tidak memungkinkan untuk memanfaatkan lahan sebagai sumber usaha. Masyarakat perlu mencari peluang usaha dengan memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang tersedia di lingkungan tersebut. Sebagai contoh, telah diupayakan oleh kelompok warga tertentu di kampung kumuh melalui pengelolaan MCK, dan optimalisasi pengelolaan sampah. Kedua sumber lokal tersebut dikelola dengan baik oleh warga melalui pembinaan, dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan penghasilan bagi masyarakat. Keuntungan yang dapat diperoleh dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu warga masyarakat mempunyai sumber keuangan tambahan, juga dapat menjaga lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Apabila kondisi seperti ini dapat dipertahankan dengan baik dan berkesinambungan, maka dapat membantu meningkatkan kesejahteraan warga.

2. Konsep Pemberdayaan

Pada intinya bahwa pemberdayaan itu ditujukan untuk pemberian kesempatan kepada semua pihak untuk dapat melakukan sesuatu. Dikemukakan oleh Fraskho(2000) bahwa lahirnya konsep pemberdayaan merupakan antitesis terhadap model pembangunan dan industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Pemberdayaan diartikan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah (Friedman, 1991). Kekuatan dalam perspektif ilmu politik dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Melalui pemberdayaan, setiap orang diarahkan untuk memegang peran sebagai pelaku pembangunan, bukan sebagai korban pembangunan.

Pemberdayaan sering dikaitkan dengan partisipasi (Hadiwinata, 2003). Keduanya saling berkaitan, partisipasi masyarakat akan tumbuh melalui upaya berupa pemberdayaan. Melalui pemberdayaan, masyarakat didorong untuk menjadi “berdaya”, dengan melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga perlu peningkatan kapasitas dalam masyarakat tersebut.

Proses pemberdayaan juga terkait dengan perempuan, sebagai bagian penting dari struktur masyarakat sipil untuk berperan dalam pembangunan. Melalui proses pemberdayaan kepada perempuan, berarti terjadi juga proses kesetaraan gender. Kesetaraan gender terjadi dengan adanya kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, dalam hal ini peluang usaha.

Saat ini paradigma yang ada adalah pemberdayaan masyarakat, dengan memberikan hak kepada masyarakat untuk mengelola sumberdaya dalam rangka melaksanakan pembangunan. Melalui paradigma ini, kelompok masyarakat miskin diberikan kesempatan yang sama untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan. Selain itu, masyarakat miskin memperoleh kekuasaan untuk mengelola dana sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak lain. Kondisi seperti ini mencerminkan perbedaan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat.

3. Program UPPKS

Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, salah satunya dengan melalui pengentasan kemiskinan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 48 Ayat 1 bagian (f) menyatakan bahwa salah satu cara melakukan kebijakan pembangunan keluarga dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga adalah dengan meningkatkan peluang dan akses penerimaan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga. Berdasarkan undang-undang tersebut, BKKBN perlu meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas kependudukan.

Upaya yang dilakukan pemerintah melalui BKKBN disalurkan melalui pemberian bantuan langsung tunai, pemberian bimbingan usaha, dan pemberdayaan keluarga. Bentuk kegiatan yang dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan keluarga yang pelaksanaannya di atur dalam Impres Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pembangunan keluarga Sejahtera dalam rangka Peningkatan Penanggulangan kemiskinan. Penekanan pada Inpres ini yaitu pada perlunya usaha yang terpadu menyeluruh yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan keluarga. Tujuan dari usaha terpadu tersebut untuk memberikan kemampuan pada keluarga terutama keluarga yang masih dalam tahap Pra KS dan KS I, agar dapat memanfaatkan berbagai peluang dan dukungan yang ada untuk meningkatkan kapasitasnya dalam bidang sosial dan ekonomi.

Kapasitas yang dimaksud mencakup wawasan yang lebih luas, sikap, perilaku dan nilai-nilai yang dimiliki warga dalam menjunjung tinggi sifat hemat, perencanaan kedepan dan mampu mengumpulkan modal kerja secara mandiri untuk mengembangkan usahanya.

Program UPPKS merupakan program untuk mendukung program KB, yang anggotanya terdiri dari keluarga Pra Sejahtera dan KS I. Kegiatan yang dilakukan melalui pembentukan kelompok wirausaha, untuk peningkatan kesejahteraan keluarga. Rintisan kegiatan ini dilakukan oleh BKKBN sejak tahun 1976, dengan tujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga perseta KB agar lebih sejahtera hidupnya. Usaha yang dilakukan dalam kegiatan UPPKS merupakan model usaha mikro keluarga, namun diharapkan dapat berfungsi menggerakkan roda ekonomi keluarga. Hal ini diperlukan bimbingan dan pembelajaran ekonomi kepada keluarga, yang didukung dengan pemberian motivasi dan semangat keluarga untuk berwirausaha (BKKBN, 2005).

Meskipun bentuk usaha yang dikelola keluarga pra KS dan KS I umumnya skala kecil (mikro), namun bagi mereka masalah utama tetap pada persoalan permodalan (keterbatasan terhadap modal). Oleh karena itu, penanganannya dengan pemberian permodalan berupa kredit, terutama bagi mereka yang sudah mempunyai embrio usaha ekonomi produktif. Semua kegiatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pendapatan keluarga, dan dalam jangka panjang dapat berdampak pada kesejahteraan keluarga. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui BKKBN dalam rangka mengembangkan kelompok UPPKS, antara lain melalui:

1. Pemberian bantuan fasilitas permodalan kepada kelompok yang meliputi dana bergulir, dana Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kukesra, Kredit Pengembangan Kemitraan Usaha (KPKU), dan kredit lainnya
2. Pembinaan dan pengembangan usaha kelompok UPPKS melalui kegiatan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam kegiatan tersebut melalui berbagai kegiatan pembinaan dan pelatihan
3. Membangun kemitraan baik dalam hal permodalan, SDM, produksi, manajemen usaha, penerapan teknologi tepat guna, dan pemasaran
4. Perluasan jaringan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan akses anggota kelompok ini dengan berbagai pihak
5. Pembinaan produksi agar kelompok ini menghasilkan produk, baik kuantitas maupun kualitas, yang sesuai dengan permintaan pasar. Kegiatan-kegiatan yang diberikan kepada kelompok dengan komprehensif untuk pengembangan usaha ekonomi produktif ditujukan untuk dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Bantuan permodalan Kukesra diberikan kepada Keluarga Pra Sejahtera dan KS I yang bertempat tinggal di luar Desa Tertinggal dan telah menjadi anggota Kelompok UPPKS. Keluarga-keluarga tersebut diberikan bantuan usaha di sektor produktif, dengan harapan dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan semangat gemar menabung, sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I melalui Program UPPKS pernah dilakukan BKKBN bekerjasama dengan kementerian lain, misalnya dengan Kementerian Ketenagakerjaan yang dituangkan dalam naskah kerja sama Kep.102/Men/1997 dan Kep. 132/Hk. 104/H.3/1997 Tanggal 3 Juni 1997 tentang pengembangan produktifitas dan pemberdayaan Keluarga. Jika dilihat dari tujuannya, secara khusus kegiatan UPPKS antara lain sebagai berikut:

1. Menumbuhkan dinamika kelompok, dengan mendorong anggota untuk dapat meningkatkan dan memantapkan kesertaan dalam ber KB, terutama kesertaan dalam pemakaian alat kontrasepsi yang efektif
2. Mengisi kegiatan ekonomi produktif kepada kelompok peserta KB, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup kelompok-kelompok tersebut
3. Mengembangkan kegiatan sosial ekonomi (khususnya para perempuan peserta KB) sehingga perannya meningkat baik dalam keluarga maupun masyarakat
4. Mendorong kemandirian kelompok dalam peningkatan ekonomi keluarga dengan melakukan usaha-usaha produktif
5. Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman anggota kelompok dalam organisasi maupun pengelolaan administrasi keuangan
6. Mendorong kelompok dalam memperoleh bantuan permodalan.

Kegiatan kelompok ekonomi merupakan suatu kegiatan yang bagus bagi keluarga-keluarga pra Sejahtera dan Sejahtera I, namun tidak mudah untuk melakukan kegiatan kelompok secara serasi dan efektif. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan supaya terjadi kerja sama yang efektif dalam kelompok (Floyd Ruch), sebagai berikut :

1. Suasana kelompok (*atmosphere*), yaitu perlunya situasi yang menjadikan setiap anggota kelompok merasa senang menjadi anggota kelompoknya.
2. Kepemimpinan bergilir (*distributive leadership*), yaitu adanya giliran dalam kekuasaan untuk mengendalikan dan pengawasan terhadap kelompoknya
3. Perumusan tujuan (*goal formulation*), yaitu adanya tujuan bersama yang menjadi arah kegiatan bersama, karena tujuan ini merupakan integrasi dari tujuan masing-masing individu.
4. Fleksibilitas (*flexibility*), yaitu sesuatu yang menyangkut kelompok seperti suasana, tujuan, kegiatan, struktur dapat mengikuti perubahan yang terjadi tanpa adanya pengorbanan
5. Mufakat (*consensus*), yaitu adanya mufakat dalam kelompok untuk mencapai keputusan, untuk mengatasi berbagai perbedaan pendapat dari anggota
6. Kesadaran kelompok (*process awareness*), yaitu adanya peranan, fungsi, dan kegiatan masing-masing anggota dalam kehidupan kelompok
7. Penilaian yang kontinu (*continual evaluation*), yaitu adanya penilaian kontinu terhadap berbagai hal mulai perencanaan, sampai pengawasan kelompok, untuk mengetahui capaian tujuan kelompok.

Secara teori, banyak metode atau cara yang dapat dilakukan dalam memberdayakan masyarakat miskin, baik secara kelompok maupun individu. Pemberdayaan keluarga miskin dapat dilakukan dengan bertumpu pada berbagai hal berikut:

1. Komunitas masyarakat secara umum

Pemberdayaan seperti ini dilakukan dengan memadukan keluargamiskin dengan masyarakat sekitarnya, yang kemudian diberdayakan secara individual atau kelompok. Jadi dalam hal ini pemberdayaan masyarakat miskin dilakukan dengan melihat masyarakat miskin sebagai satu kesatuan komunitas dengan masyarakat

2. Komunitas dengan prioritas

Pemberdayaan komunitas masyarakat dengan tetap menempatkan keluarga miskin pada lingkup komunitas masyarakat tersebut, namun dengan memberikan prioritas tertentu kepada keluarga miskin sesuai kondisinya

3. Pengelompokan masyarakat miskin berdasarkan hubungan sosial, kondisi dan penyebab kemiskinannya

Pemberdayaan ini dilakukan program-program pemberdayaan khusus sesuai dengan kondisi dan penyebab kemiskinan perkelompok

4. Keluarga, dalam memberdayakan ini setiap keluarga miskin dilakukan pemberdayaan secara sendiri-sendiri sesuai dengan kondisi dan penyebab kemiskinan masing-masing keluarga

Upaya mewujudkan tujuan dan sasaran program UPPKS ini dalam pelaksanaannya di lapangan banyak mengalami hambatan dan permasalahan. Berbagai kendala atau permasalahan yang ditemukan di lapangan antara lain:

1. Kurangnya sosialisasi program, sehingga masih banyak anggota dan pengurus UPPKS yang tidak mengetahui program
2. Jumlah pendamping kelompok UPPKS yang tidak sebanding dengan jumlah kelompok UPPKS
3. Belum semua kelompok UPPKS mempunyai struktur organisasi yang jelas
Ada kelompok, tetapi belum mempunyai kegiatan, dan ada kegiatan usaha tetapi belum berkelompok, masih bersifat mandiri dan tidak diorganisir dengan baik
4. Kesulitan memperoleh permodalan atau kemitraan untuk kelompok UPPKS, dana masih ada kekhawatiran dari kelompok untuk melakukan pinjaman dari perbankan.

Bagaimana kondisi UPPKS sendiri di berbagai wilayah di Indonesia? Dari Tabel 1 tampak bahwa belum semua provinsi mempunyai anggota kegiatan UPPKS. Berdasarkan data Siduga BKKBN, pada Tahun 2015 terdapat 12,405 anggota kelompok kegiatan ekonomi keluarga UPPKS. Dari sejumlah itu, sebanyak 73,83 persen berstatus PUS (Pasangan Usia Subur) yang menggunakan alat kontrasepsi atau ber KB. Khusus untuk anggota kegiatan UPPKS PUS yang ber KB, sebanyak 56,17 persen berasal dari Keluarga Pra KS, dan KS I.

Anggota UPPKS wilayah Luar Jawa Bali I yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, dan Gorontalo tidak mempunyai data, atau datanya kosong. Hal ini menunjukkan memang belum ada kegiatan kelompok UPPKS, atau memang belum ada laporan kegiatan. Apabila dilihat dari Tabel 1, paling banyak anggota kelompok UPPKS terdapat di Jawa Tengah (Jawa Bali), Kalimantan Barat (luar Jawa Bali I), dan Nusa Tenggara Timur (luar Jawa Bali II). Secara keseluruhan, paling banyak di Jawa Tengah yang menjadi anggota kelompok UPPKS.

Jika dilihat dari data Tahun 2014, tampaknya jumlah anggota UPPKS lebih banyak daripada Tahun 2015, nampak dari jumlah provinsi yang dilaporkan juga lebih banyak. Seperti disajikan pada Tabel 2, sebanyak 56,91 persen keluarga pra KS dan KS I menjadi anggota kelompok UPPKS.

1. Kegiatan Kelompok Ibu-ibu di Daerah Permukiman Padat dan Kumuh

Pemberdayaan masyarakat sudah selayaknya dilakukan di berbagai tempat, tidak hanya di perdesaan melainkan juga di daerah perkotaan, terutama di daerah kumuh dan miskin. Salah satu daerah kumuh dan miskin di daerah Ibu Kota Jakarta yaitu Kampung Cikini Kramat atau Cikini Ampium, Jakarta Pusat. Kampung ini berada di wilayah RW 01 Kelurahan Pegangsaan. Data Tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di wilayah RW 01 sebanyak 3.200 jiwa, dengan kepadatan 800 orang/hektar.

Daerah ini terkenal sebagai tempat pengrajin keranjang parcel, yang sudah tersedia jalur pemasarannya, karena tidak jauh dari lokasi adalah pusat pemasaran keranjang parcel. Mata pencaharian sebagian besar warga masyarakat adalah pedagang di pasar tradisional Cikini. Meskipun demikian, masih banyak warga masyarakat yang menganggur, dan tidak mempunyai keahlian mengelola keuangan rumah tangga dengan baik. Sementara lingkungan tempat tinggal mereka berada di daerah ibu kota negara, yang di sekelilingnya banyak pusat perbelanjaan dan pasar. Situasi seperti ini merupakan tantangan bagi warga untuk hidup sederhana, tidak konsumtif, sesuai dengan kondisi keuangan mereka.

Pemerintah telah berupaya memberikan program terkait dengan peningkatan ekonomi warga masyarakat. Namun sayang, program tersebut tidak berkesinambungan. Bahkan tim dari perguruan tinggi yaitu dari Universitas Indonesia melalui program pengabdian kepada masyarakat telah melakukan program peningkatan penghasilan warga masyarakat. Kegiatan yang dilakukan dengan memberikan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan rumah tangga, dan pemberian pelatihan keterampilan kepada ibu-ibu. Tujuan dari pemberian program ini yaitu untuk memberikan motivasi kepada ibu-ibu dalam upaya menggiatkan ekonominya untuk meningkatkan kesejahteraan.

Kondisi ekonomi masyarakat di daerah tersebut umumnya tergolong rendah, sehingga menjadi persoalan pokok masyarakat di kawasan tersebut. Hal ini berdampak pada terbatasnya kapasitas masyarakat dalam penyediaan sarana umum, dan sarana sosial dengan baik. Ketidakmampuan masyarakat tidak hanya karena kondisi ekonomi yang terbatas, melainkan juga karena ketidaktauhuan cara mengelola keuangan dan sumber-sumber keuangan.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat Universitas Indonesia (MisCicik, 2015) dapat dilihat berbagai kondisi sosial ekonomi masyarakat daerah padat dan miskin di perkotaan. Dilihat dari kondisi sosial ekonomi, sebagian besar kepala rumah tangga berpendidikan tamat SMA/SMK (49%), dan mereka umumnya mempunyai pekerjaan (76%). Sementara sebagian besar ibu-ibu yang tinggal di daerah tersebut bekerja sebagai ibu rumah tangga yaitu 94 persen. Meskipun demikian, mereka juga bekerja untuk membantu menghasilkan uang (51,6%), misalnya sebagai buruh cuci, atau membantu pekerjaan lain di tetangganya. Dari segi jam kerja, sebagian ibu-ibu (35,5 persen dari 210 orang) menyatakan bahwa bekerja kurang dari 14 jam dalam seminggu. Mereka juga tidak memiliki usaha lain, sementara mereka sedang tidak bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak waktu luang untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat meningkatkan penghasilan rumah tangga. Mereka juga tidak mengikuti kegiatan sosial di lingkungannya, meski banyak waktu luang yang dapat dimanfaatkan, yaitu sebanyak 57,1 persen dari 210 ibu-ibu yang berhasil diwawancarai.

Meskipun sebagian besar warga mempunyai mata pencaharian sebagai pedagang, namun masih sedikit rumah tangga yang mendapat bantuan kredit usaha, hanya sebanyak 35 orang. Dari sejumlah tersebut, hanya 5 (lima) orang yang memperoleh kredit usaha dari PNPM atau program pemerintah lainnya, dan 4 (empat) orang mendapat kredit dari perbankan. Lainnya sebanyak 12 orang memperoleh kredit perorangan, dan 10 orang memperoleh kredit usaha lainnya. Jenis kredit perorangan yang diperoleh bukan dari perbankan atau pemerintah perlu diwaspadai, karena banyak warga masyarakat yang terjebak dengan rentenir. Umumnya mereka memberikan kredit kepada masyarakat dengan bunga yang sangat tinggi, dan dicicil setiap hari atau mingguan.

Masyarakat terpaksa melakukan pinjaman atau kredit kepada pihak lain, karena mereka merasa penghasilan rumah tangga per bulan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti dapat dilihat dari data, sebanyak 78 dari 210 orang (37,1%) menyatakan bahwa penghasilan mereka tidak cukup. Jika demikian, maka mereka banyak yang meminjam uang kepada saudara/teman sebanyak 71 orang (33,8%), ke tukang kredit (5,2%), pegadaian (4,8%), koperasi (2,9%), dan menjual barang (4,8%). Sebaliknya jika mereka merasa kelebihan uang, masih banyak warga yang menggunakan uangnya untuk barang yang bersifat konsumtif daripada menabung. Barang-barang konsumtif yang mereka beli umumnya berupa telepon genggam, baju, kosmetik, dan lain-lain, dengan persentase sebanyak 17,6 persen.

Sesuai dengan informasi yang diperoleh mengenai karakteristik sosial ekonomi warga masyarakat terutama ibu-ibu di wilayah tersebut, maka tim pengabdian masyarakat melakukan kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan rumah tangga, dan pelatihan keterampilan. Jenis kegiatan keterampilan yang diberikan sesuai dengan keinginan dari warga ibu-ibu, yaitu sebanyak 23,3 persen menginginkan pelatihan kerajinan tangan, dan 30,5 persen pelatihan memasak atau membuat kue.

Berikut berbagai kegiatan ibu-ibu warga dalam program pengabdian masyarakat. Kegiatan seperti ini perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat, sehingga dapat berkesinambungan. Karena warga masyarakat terutama ibu-ibu sudah mempunyai minat dan motivasi untuk mengikuti kegiatan, dan mempunyai keinginan untuk membentuk kelompok usaha bersama. Beberapa ibu-ibu sudah mempunyai keterampilan membuat kue, dan sudah berhasil memasarkannya, hanya tinggal memperluas cakupan pemasaran. Sementara untuk ibu-ibu lainnya, ada yang mempunyai keterampilan membuat keranjang, dan membuat hiasan untuk hantaran.

Semua keterampilan yang dimiliki ibu-ibu tersebut dapat menjadi modal usaha bagi warga ibu-ibu tersebut untuk membentuk kelompok usaha. Hanya kendalanya perlu pendamping kegiatan yang dapat menjaga keberlangsungan usaha tersebut. Meskipun sebenarnya diantara anggota ibu-ibu tersebut terdapat beberapa kader, seperti kader posyandu atau kader Paud (Pendidikan anak usia dini). Namun tetap perlu ada pendamping dari pihak pemerintah setempat.

5. Penutup

Upaya peningkatan kesejahteraan keluarga merupakan salah satu tujuan dari program KB, terutama ditujukan untuk keluarga pra KS dan KS I. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yaitu melalui pembentukan kelompok UPKS. Program ini merupakan program pemberdayaan ekonomi keluarga, yang sampai saat ini masih mengalami kendala dalam pelaksanaannya.

Sebagai upaya pengembangan program dan menjaga kesinambungan program, maka berbagai kendala tersebut perlu diatasi antara lain dengan peningkatan sosialisasi program baik kepada keluarga sasaran maupun kepada pelaksana program. Selain itu, perlu peningkatan kapasitas baik untuk keluarga sasaran maupun pelaksana atau pendamping program, sehingga mereka meningkat pengetahuan dan pemahaman mengenai program. Upaya menjaga kesinambungan program, perlu dibina jejaring kemitraan dengan pihak lain, termasuk swasta, dan bimbingan dan pendampingan secara kesinambungan. Di beberapa wilayah seperti di Kampung Cikini sudah pernah dilakukn program pemberdayaan masyarakat, yang apabila diintegrasikan dengan program UPPKS dapat membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

6. Daftar Pustaka

- BKKBN. 2014. *Data Siduga Jumlah Anggota Kelompok Kegiatan Ekonomi Keluarga UPPKS Tahun 2014*. Jakarta: BKKBN.
- BKKBN, 2015. *Data Siduga Jumlah Anggota Kelompok Kegiatan Ekonomi Keluarga UPPKS Tahun 2015*. Jakarta: BKKBN.
- Maria Fraskho, (2000), Fraskho, Maria, 2000 , “Praktek dan Teori Pembangunan Ketergantungan”, Analisis CSIS No. 9. Jakarta.
- MisCicuh, Lilis Heri. 2015. Program Pengabdian Masyarakat Bidang Ekonomi di Kampung Cikini Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat. Jakarta: DRPM Universitas Indonesia.
- Mutaqin, Zainal. 1998. Efektivitas Komunikasi Program Kukesra di Kabupaten Sukabumi. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/22643>
- Friedman, John. 1991. *Empowerment; The Politics of Alternative Development*. Cambridge. Blackwell.
- Hadiwinata dan Bob S. 2003. *The Politics of NGOs in Indonesia: Developing Democracy and Managing a Movement*. New York: Routledge Curzon.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Simanjuntak, Menara. 2014. “Analisis Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera di DKI Jakarta”. *Jurnal Binus Business Review, Vol. 5 No. 2 November 2014: 601-614*. Jakarta: Binus.

Tabel 1. Jumlah Anggota Kelompok Kegiatan Ekonomi Keluarga UPPKS Menurut Wilayah, Indonesia, 2015

	Ada		Berstatus PUS		Berstatus PUS Ber-KB			
	Seluruh KS	KPS dan KS I	Seluruh KS	KPS dan KS I	Seluruh KS	%	KPS dan KS I	%
Jawa Barat	20	17	19	17	18	94.74	17	94.44
Jawa Tengah	8,647	4,720	7,246	3,501	5,347	73.79	2,942	55.02
Jawa Timur	991	810	861	633	601	69.80	487	81.03
Jumlah Jawa Bali	9,658	5,547	8,126	4,151	5,966	73.42	3,446	57.76
Aceh	550	431	450	296	340	75.56	220	64.71
Sumatera Utara	589	313	400	242	366	91.50	219	59.84
Kalimantan Barat	1,072	380	788	299	494	62.69	228	46.15
Kalimantan Selatan	387	107	299	78	268	89.63	41	15.30
Sulawesi Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0
Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Luar Jawa Bali I	2,598	1,231	1,937	915	1,468	75.79	708	48.23
Nusa Tenggara Timur	124	120	52	49	27	51.92	26	96.30
Sulawesi Tenggara	25	25	25	25	25	100	25	100
Jumlah Luar Jawa Bali II	149	145	77	74	52	67.53	51	98.08
Jumlah	12,405	6,923	10,140	5,140	7,486	73.83	4,205	56.17

Sumber: BKKBN, 2015

Tabel 2. Jumlah Anggota Kelompok Kegiatan Ekonomi Keluarga UPPKS Menurut Wilayah, Indonesia, 2014

	Ada		Berstatus PUS		Berstatus PUS Ber-KB			
	Seuruh KS	KPS dan KS I	Seuruh KS	KPS dan KS I	Seuruh KS	%	KPS dan KS I	%
Jawa Bali								
DKI Jakarta	6,27	3,359	3,82	1,773	2,902	75.97	1,375	47.38
Jawa Barat	137,985	92,048	97,832	68,935	79,641	81.41	57,442	72.13
Jawa Tengah	1,182,15	551,779	702,868	393,688	586,903	83.5	324,479	55.29
DI Yogyakarta	64,103	35,852	46,372	25,768	40,243	86.78	22,015	54.71
Jawa Timur	205,688	149,519	159,726	115,735	136,899	85.71	99,555	72.72
Banten	943	492	584	310	560	95.89	295	52.68
Bali	39,656	9,105	33,662	6,895	31,101	92.39	6,139	19.74
Jumlah Jawa Bali	1,636,78	842,154	1,044,86	613,104	878,249	84.05	511,3	58.22
Aceh	13,314	10,652	8,575	6,127	6,977	81.36	5,017	71.91
Sumatera Utara	22,692	14,666	16,567	10,679	12,93	78.05	8,007	61.93
Sumatera Barat	14,712	8,107	10,722	5,509	7,778	72.54	4,424	56.88
Sumatera Selatan	33,33	22,903	22,955	16,699	18,146	79.05	13,587	74.88
Lampung	47,918	34,193	39,313	26,79	33,965	86.4	22,859	67.30
Bangka Belitung	999	301	629	209	363	57.71	101	27.82
Nusa Tenggara Barat	12,815	9,898	8,349	6,717	7,303	87.47	6,01	82.29
Kaimantan Barat	22,737	19,326	5,034	2,854	3,805	75.59	2,334	61.34
Kalimantan Selatan	17,921	10,52	13,002	7,503	11,233	86.39	6,289	55.99
Sulawesi Utara	12,347	8,057	10,223	6,884	8,649	84.6	5,627	65.06
Sulawesi Selatan	25,631	16,133	18,686	12,392	15,048	80.53	10,343	68.73
Gorontalo	1,868	1,734	1,725	1,624	1,675	97.1	1,581	94.39
Sulawesi Barat	7,591	4,413	4,759	3,608	3,226	67.79	2,62	81.22
Jumlah Luar Jawa Bali I	233,875	160,903	160,539	107,595	131,098	81.66	88,799	67.73
Luar Jawa Bali II								
Riau	3,309	1,038	1,436	535	1,135	79.04	423	37.27
Jambi	7,508	4,218	5,075	3,589	4,205	82.86	3,069	72.98
Bengkulu	4,296	2,327	2,125	1,354	1,638	77.08	1,062	64.84
Kepulauan Riau	4,655	2,36	1,468	442	1,21	82.43	327	27.02
Nusa Tenggara Timur	6,392	4,406	3,666	2,33	3,077	83.93	1,937	62.95
Kalimantan Tengah	5,286	3,432	4,605	2,946	3,673	79.76	2,275	61.94
Kalimantan Timur	6,107	2,655	4,481	1,877	4,129	92.14	1,768	42.82
Sulawesi Tengah	7,197	5,208	4,339	3,885	3,279	75.57	2,799	85.36
Sulawesi Tenggara	5,292	3,263	4,793	2,767	3,871	80.76	2,488	64.27
Maluku	2,902	2,75	2,844	2,744	2,826	99.37	2,729	96.57
Maluku Utara	2,82	1,483	1,964	1,056	1,68	85.54	835	49.70
Papua	2,004	1,371	1,394	885	1,122	80.49	694	61.85
Papua Barat	1,069	868	847	748	843	99.53	688	81.61
Jumlah Luar Jawa Bali II	58,837	35,379	39,037	25,158	32,688	83.74	21,094	64.53
JUMLAH	1,929,45	1,038,436	1,244,44	745,857	1,042,03	83.74	621,193	59.61

Sumber: BKKBN, 2014

Gambar 1. Kegiatan Keterampilan Ibu-ibu Kampung Cikini, Jakarta Pusat



**Gambar 2. Hasil Kegiatan Keterampilan Ibu-ibu Kampung
Cikini, Jakarta Pusat**

